

ARTIKEL ILMIAH

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KOPERASI ATAS PINJAMAN
BERMASALAH YANG MENGGUNAKAN SISTEM TANGGUNG RENTENG PADA
KWSU “SETIA BUDI WANITA” JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

PIPIET NOVIANTI

NIM. 105010113111015



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

HALAMAN PERSETUJUAN ARTIKEL ILMIAH

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KOPERASI
ATAS PINJAMAN YANG MENGGUNAKAN SISTEM
TANGGUNG RENTENG PADA KWSU "SETIA BUDI
WANITA" JAWA TIMUR**

Identitas Penulis

a. Nama : Pipiet Novianti
b. Nim : 105010113111015
c. Konsentrasi : Hukum Ekonomi Dan Bisnis

Jangka waktu penelitian : 4 bulan

Disetujui pada tanggal : **12 MAY 2015**

Pembimbing Utama



Herman Suryokumoro, S.H., M.S
NIP. 19560528 198503 1 002

Pembimbing Pendamping



Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.
NIP. 19811214 200801 2 010

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dyunikash, S.H., M.H.
NIP. 19721130 199802 2 001

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KOPERASI
ATAS PINJAMAN YANG MENGGUNAKAN SISTEM TANGGUNG RENTENG PADA
KWSU “SETIA BUDI WANITA” JAWA TIMUR**

Pipiet Novianti, Herman Suryokumoro S.H., M.S., Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : 105010113111015@mail.ub.ac.id

ABSTRAK

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum bagi anggota koperasi atas pinjaman yang menggunakan sistem tanggung renteng pada KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur. Tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya pinjaman bermasalah yang menggunakan sistem tanggung renteng pada KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur. Dalam hal ini anggota debitur utama melakukan wanprestasi, dan terhadapnya debitur tanggung renteng bertanggung jawab atas prestasi yang belum tentu memperoleh penggantian kembali dari debitur sebagai mana hak dalam KUHPdata. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anggota koperasi atas pinjaman yang menggunakan sistem tanggung renteng dan penyelesaian pinjaman tanggung renteng bermasalah pada KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa perlindungan hukum meliputi perlindungan hukum preventif dan represif. Ketentuan perundang-undangan terkait perkoperasian belum mengatur secara jelas dan tegas mengenai simpan pinjam yang menggunakan sistem tanggung renteng seperti dalam KUHPdata sehingga berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*. Penyelesaian pinjaman bermasalah menggunakan mekanisme kewajiban kelompok, karena pada mekanisme perpanjangan jangka waktu debitur tidak dapat membayar. Pada mekanisme tersebut pun debitur tetap tidak dapat membayar penuh angsuran, sehingga sisa angsuran di bebankan kepada kelompok secara tanggung renteng.

Kata kunci: perlindungan hukum, koperasi, tanggung renteng

ABSTRACT

*In this paper, the authors raise the issue of legal protection for members of cooperatives for the loan that uses joint responsibility on KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur. The theme background by the troubled loans that use the joint responsibility on KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur. In this case the members of the principal debtor in default, and against the debtor jointly and severally responsible for the achievement is not necessarily entitled to recover back from the debtor as to which rights in the Burgerlijk Wetboek. Based on this background, the writing of this thesis aims to determine, describe and analyze the form of legal protection for members of the cooperative on a loan that uses a system of joint liability and joint liability loan settlement problems at the KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur. Based on the results of the study, the authors obtained answers to the problems that exist, that legal protection covers preventive and repressive legal protection. Statutory provisions related to cooperatives has not set out clear and unequivocal about the savings and loans were used as the joint responsibility of the Burgerlijk Wetboek that applies the principle of *lex specialist derogat lex generalis*. Completion of troubled loans using group liability mechanisms, since the period of the extension mechanism of the debtor can not pay. On the mechanism of the debtor were still not able to pay the full installment, so the rest of the installments in the charge to the group jointly and severally.*

Keywords: legal protection, cooperatives, joint responsibility

A. Pendahuluan

Keberadaan badan hukum koperasi erat sekali kaitannya dengan sistem perekonomian yang berada di Indonesia. Yang mana pada saat ini setiap individu diupayakan untuk mempunyai usaha sendiri karena tuntutan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari lebih berkembang. Untuk itu perlu didirikannya koperasi bertujuan membantu calon pengusaha-pengusaha kecil agar dapat menjalankan kegiatan usahanya demi tercapainya tujuan kesejahteraan rakyat. Secara etimologi koperasi berasal dari kata yang dalam

bahasa Inggris yaitu *cooperatives* yang merupakan gabungan dua kata, *co* dan *operation*.¹ Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie* yang mempunyai arti kerja sama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang bersifat sukarela.

Adanya koperasi saat ini sangatlah diperlukan untuk menunjang kegiatan ekonomi para anggotanya terutama untuk mendapatkan pinjaman modal usaha selain hal tersebut dapat diperoleh dari lembaga perbankan. Koperasi menyediakan layanan simpan pinjam terutama bagi anggotanya, prosedurnya pun tidaklah serumit di lembaga perbankan dikarenakan dalam kegiatan kredit koperasi tidak begitu dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan. Sistem tanggung renteng digunakan karena koperasi tidak mengutamakan jaminan kebendaan sebagai syarat pencairan pinjaman seperti di lembaga keuangan. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama diantara anggota atau di satu kelompok atas segala kewajiban mereka terhadap koperasi dengan berdasarkan keterbukaan dan saling percaya.²

Pengaturan sistem tanggung renteng ini diatur dalam buku ke tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295 KUHPerdata dan mengenai penggunaan sistem tanggung renteng untuk menjalankan kegiatan simpan pinjam terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Dengan hanya berdasarkan KUHPerdata dan peraturan terkait koperasi diatas, yang menjadi pertanyaan adalah apakah peraturan yang ada cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam yang menggunakan sistem tanggung renteng, apalagi ketika dalam pemberian pinjaman dengan sistem tanggung renteng tersebut ternyata muncul pinjaman bermasalah.

Dalam penerapan sistem tanggung renteng, pada kenyataannya juga terdapat permasalahan, antara lain adalah anggota peminjam (debitur utama) melakukan wanprestasi angsuran pinjaman, sehingga debitur serta atau yang disebut pula debitur

¹ Andjar Pachta W. dkk, **Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 15.

² Penjelasan **Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 96/Kep/M.Kukm/IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.**

tanggung renteng yaitu seluruh anggota kelompok berkewajiban untuk membayar angsuran debitor. Proses tanggung renteng ini mempunyai dampak bagi kelancaran kegiatan pemanfaatan jasa pinjaman koperasi ketika debitor serta tidak dapat sepenuhnya memenuhi pembayaran angsuran dari debitor utama dikarenakan kurangnya dana dari spontanitas anggota karena jumlah angsuran yang akan ditanggung terlalu banyak.

Pada KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur kasus yang terjadi adalah seorang mempunyai pinjaman dengan sistem tanggung renteng yang total angsuran tiap bulan adalah Rp. 2.090.925,00 (dua juta sembilan puluh ribu Sembilan puluh lima rupiah), debitor tersebut dalam masa kreditnya mengalami kerugian pada usaha yang ia miliki sehingga tidak dapat membayar angsuran. Kewajiban kelompok adalah membayarkan prestasi debitor, namun dikarenakan banyaknya jumlah angsuran, anggota kelompok merasa keberatan dikarenakan anggota yang lain juga harus membayar angsuran pinjaman miliknya.³

Berdasarkan isu hukum dan permasalahan hukum diatas, untuk itu penulis merasa perlu meneliti mengenai penanggungan atau sistem tanggung renteng, dengan judul: **Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Atas Pinjaman Yang Menggunakan Sistem Tanggung Renteng Pada KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur.**

B. Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anggota koperasi terhadap penyelesaian pinjaman bermasalah dengan menggunakan sistem tanggung renteng?
2. Bagaimana penyelesaian pinjaman bermasalah yang menggunakan sistem tanggung renteng di KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur?

C. Pembahasan

1. Metode Penelitian

- a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

³ Hasil wawancara dengan Ibu Peni Setiya Martiningsih, Penanggung Jawab Kelompok 139 Koperasi Wanita “Setia Budi Wanita” Malang, pada tanggal 08 April 2014.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama adalah penelitian yuridis normatif karena disini penulis mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas pinjaman yang menggunakan sistem tanggung renteng, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan metode pendekatan sistematis (*systematical approach*), yang dipakai untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis penyelesaian pinjaman tanggung renteng.

Jenis penelitian untuk menjawab rumusan masalah kedua adalah penelitian yuridis empiris, karena disini penulis mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis penyelesaian pinjaman bermasalah pada KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

b. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah salah satu Koperasi yang berada di Kota Malang, yaitu KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur, beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 76. Alasan dipilihnya lokasi ini karena koperasi tersebut menggunakan sistem tanggung renteng dalam melakukan kegiatan simpan pinjam. Selain itu juga terdapat kasus pinjaman bermasalah pada simpan pinjam dengan menggunakan sistem tanggung renteng.

c. Jenis Bahan Hukum dan Jenis Data

1. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomor: 19/PER/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 96/KEP/M.KUKM/IX/2004, Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke III, Perjanjian Pinjaman Anggota (Surat Pengajuan Pinjaman), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan pada bahan hukum primer, antara lain buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli dan lain-lain. Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan pada bahan hukum sekunder.

2. Jenis Data

Data primer, dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dari pihak yang terkait dengan penyelesaian pinjaman bermasalah yang menggunakan sistem tanggung renteng di KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur. Data sekunder berupa dokumen, catatan, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, hasil penelitian, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

d. Sumber Bahan Hukum dan Sumber Data

1. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan

Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, dan internet.

2. Sumber Data

Data primer diperoleh dari Pengurus, anggota atau kelompok anggota KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur. Data sekunder diperoleh dari Pengurus KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur dan dari sumber bahan bacaan pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, dan internet.

e. Teknik Memperoleh Bahan Hukum dan Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Reaseacrh*), dan studi dokumen. Sedangkan teknik memperoleh data terkait data primer dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden secara langsung untuk mengetahui permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen.

f. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam penyelesaian pinjaman bermasalah yang menggunakan sistem tanggung renteng, yaitu Pengurus KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur dan anggota koperasi yang melakukan pinjaman dengan sistem tanggung renteng. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Pengurus, Penanggung Jawab Kelompok yang bermasalah, anggota yang bermasalah. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Pengurus KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur: Ibu Hesti Setyodyah Lestari, M.Psi., Ketua/Penanggung Jawab Kelompok 139: Ibu Peni Setya Martiningsih,

S.E, Debitur Anggota Kelompok 139 yang bermasalah: Ibu Tati Indramayanti.

g. Teknik Analisis Bahan Hukum dan Data

Pada penelitian normatif teknik analisis bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal, yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut. Sedangkan untuk penelitian empiris teknik analisis data, menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Dengan metode ini peneliti memaparkan terlebih dahulu kondisi di lapangan, kemudian dianalisis dan diteliti sebagai satu kesatuan.

2. Hasil Penelitian

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dalam penelitian ini perlindungan hukum preventif terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu menurut peraturan perundang-undangan terkait perkoperasian, menurut KUHPPerdata, dan menurut perjanjian simpan pinjam. Berdasarkan pertauran perundang-undangan terkait perkoperasian, Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, yang berbunyi:

“(1) Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi dapat menetapkan jaminan pemberian pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng di antara anggota atas segala kewajiban pinjaman.”

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Koperasi tersebut diatas, tanggung renteng diperlukan sebagai jaminan moral dalam hal terjadinya wanprestasi pemberian pinjaman, yang pembebanan kewajiban pembayaran angsuran debitur-utama ditanggung oleh anggota yang lain jika debitur tersebut mendapat musibah sehingga tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran.

Selain itu juga tidak menutup kemungkinan adanya jaminan kebendaan yang bisa menjadi pilihan dalam penyerahan jaminan apabila jaminan tanggung renteng tidak disetujui oleh anggota yang lain, namun pinjaman tersebut bukan merupakan pinjaman tanggung renteng. Aturan itu berguna agar koperasi yang berkedudukan sebagai kreditur terlindungi secara hukum atas pembayaran angsuran pinjaman.

Tetapi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dirasa kurang lengkap karena tidak adanya perintah untuk melunasi pinjaman yang dibayar oleh anggota yang lain atau yang dalam hal ini disebut debitur tanggung renteng. Ketentuan tersebut berbeda dengan aturan KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur yang telah memberikan perintah kepada debitur utama untuk mengganti dana tanggung renteng yang telah di bayar oleh anggota debitur tanggung renteng pada saat debitur utama wanprestasi.⁴ Hal tersebut mengakibatkan dalam Peraturan Menteri Koperasi tidak ada kesesuaian perlindungan hukum atas pelunasan pinjaman yang juga harus diberikan kepada penanggung dikarenakan aturannya hanya mengatur bagi pelunasan untuk koperasi. Untuk itu perlu ditambahkan mengenai perintah bahwa debitur harus melakukan pembayaran kembali atas pinjaman yang telah ditanggungkan kepada penanggung karena dalam perjanjian tanggung renteng tersebut sebenarnya terdapat 2 (dua) kreditur yang harus dijamin pelunasan pembayaran pinjamannya.

Selain itu, adanya penggunaan sistem tanggung renteng pada kegiatan usaha koperasi juga ada di dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan menengah Republik Indonesia Nomor : 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, yang mengacu pada ketentuan dari pasal 15 Bab V mengenai standar Operasional manajemen usaha, sebagai berikut:

Pasal 15

Standar Operasional Manajemen Usaha terdiri dari :

⁴ Hasil Hasil wawancara dengan Ketua/Penanggungjawab Kelompok 139 Ibu Peni Setiwa Martiningsih, S.E. pada tanggal 15 Juli 2014.

- a) Penghimpunan dan penyaluran dana;
- b) Jenis pinjaman;
- c) Persyaratan calon peminjam;
- d) Pelayanan pinjaman kepada unit lain;
- e) Plafond pinjaman;
- f) Biaya pinjaman;
- g) Agunan;
- h) Pengembalian dan jangka waktu pinjaman;
- i) Analisis pinjaman;
- j) Pembinaan nasabah oleh KSP/USP Koperasi;
- k) Penanganan pinjaman bermasalah.

Dapat dilihat dari ketentuan tersebut, terdapat 10 (sepuluh) upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif mengenai langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh koperasi yang akan memberikan pinjaman dan 1 (satu) upaya respresif dalam melakukan penyelesaian apabila mengalami pinjaman yang bermasalah. Keseluruhan peraturan tersebut diatas telah dijalankan oleh KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur, namun Koperasi mempunyai aturan lebih lengkap yang pada Keputusan menteri tidak secara jelas mengatur, yang antara lain mengenai plafond pinjaman dimana dalam Keputusan Menteri tidak mengatur tentang plafond pinjaman yang menggunakan sistem tanggung renteng, tetapi pada KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur mengatur hal tersebut.⁵ Dan juga terkait dengan ketentuan agunan, dalam Keputusan Menteri tidak mengatur tentang perintah kepada debitur utama untuk mengembalikan dana tanggung renteng yang mana sistem tanggung renteng ini merupakan jaminan bagi koperasi untuk mendapatkan keamanan dana pinjaman yang telah dikeluarkan. Berbeda dengan ketentuan pada Koperasi yang telah mengatur tentang pengembalian dana tanggung renteng anggota pada setiap bulannya.⁶

Pada KUHPerdata aturan mengenai tanggung renteng terdapat dalam Pasal 1278 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1295 KUHPerdata. Dalam penelitian ini

⁵ Hasil wawancara dengan Pengurus KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur, Ibu Hesti Setyodyah Lestari, M.Psi, tanggal 11 Agustus 2014.

⁶ *Ibid.*

tanggung renteng yang ada pada KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur adalah tanggung renteng pasif, dimana kreditur mempunyai hak untuk memperoleh pemenuhan prestasinya dari beberapa orang debitur. Pasal yang berkaitan dengan tanggung renteng pasif telah dilakukan oleh Koperasi, namun terdapat beberapa pasal yang tidak dipergunakan karena tanggung renteng pada koperasi tidak mensyaratkan adanya jaminan yang mana hal ini berkaitan dengan Pasal 1285 KUHPerdara terkait risiko jika barang yang diperjanjikan musnah. Selain itu Pasal 1287 KUHPerdara terkait dengan tangkisan debitur tanggung renteng, dalam penelitian ini hal tersebut tidak dapat terjadi, karena pada saat pengajuan pinjaman, formulir pengajuan pinjaman tersebut disetujui dan ditandatangani oleh minimal 50%+1 anggota yang artinya bahwa dengan jumlah tersebut mewakili keseluruhan anggota kelompok untuk bersedia menanggung renteng apabila terjadi kekurangan pembayaran angsuran anggota debitur utama.⁷ Selanjutnya Pasal 1288 KUHPerdara yang mengatur tentang pembebasan perikatan tanggung renteng akibat percampuran hutang karena pewarisan, ketentuan ini tidak terjadi dalam kegiatan simpan pinjam KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur karena pada dasarnya untuk menyelesaikan pinjaman bermasalah menggunakan sistem tanggung renteng, dan apabila terjadi debitur utama meninggal dunia, maka ia dibebaskan dari kewajiban pinjaman.⁸

Pasal 1289 dan Pasal 1290 KUHPerdara yang mengatur tentang pembebasan seorang debitur dari perjanjian tanggung renteng karena kemauan kreditur juga tidak digunakan, karena pada dasarnya tanggung renteng pada Koperasi tidak menggunakan mekanisme pembagian prestasi.⁹ Pasal 1291 KUHPerdara mengatur tentang pembebasan bunga tunggakan, dalam kegiatan simpan pinjam Koperasi ketentuan ini tidak digunakan mengingat KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur menerapkan sistem tanggung renteng secara keseluruhan seperti yang dijelaskan pada ketentuan sebelumnya. Sehingga tidak ada pembagian prestasi, bunga yang

⁷ Hasil wawancara dengan Ketua/Penanggungjawab Kelompok 139 Ibu Peni Setiya Martiningsih, S.E. pada tanggal 15 Juli 2014.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

sudah ditentukan pun juga termasuk dalam jumlah angsuran setiap bulan.¹⁰ Pasal 1292 KUHPdata mengatur tentang perikatan tanggung renteng dapat dibagi, Pada KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur, pembagian seperti ini dapat terjadi ketika anggota peminjam tidak dapat membayar keseluruhan angsuran, maka untuk memenuhinya dilakukan pengumpulan dana spontanitas anggota tanggung renteng, dan biasanya jumlahnya pun dibagi rata sesuai dengan jumlah anggota kelompok.¹¹

Menurut Perjanjian Simpan Pinjam, Jika dianalisis, formulir SPP memenuhi kriteria perjanjian yang ditentukan oleh Pasal 17 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian pinjaman dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pengurus KSP/USP Koperasi dan mengatur hal-hal yang sudah disepakati kedua belah pihak.”

Dalam praktek ketentuan ini telah dilaksanakan KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur dengan menerbitkan formulir Surat Permintaan Pinjaman (SPP) yang memuat tentang klausula peminjam, jumlah pinjaman, keperluan, pinjaman terdahulu, alasan menunggak, simpanan wajib dan simpanan pokok, tanda tangan penanggungjawab kelompok, tanda tangan suami, tanda tangan peminjam, dan pernyataan kesediaan jaminan tanggung renteng serta keputusan pengurus. Dan juga telah memenuhi Pasal 1282 KUHPdata dimana tanggung renteng ini harus dinyatakan secara tegas. Karena itu dalam formulir tersebut tertulis kalimat “Jaminan Tanggung Renteng”, dan kalimat “Menyetujui dan bersedia menanggung renteng apabila terjadi kemacetan pinjaman sebesar Rp..... Atas nama anggota tersebut di atas).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Perlindungan hukum represif merujuk pada pasal 15 huruf (k) Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam tentang Penanganan Pinjaman Bermasalah. Ketentuan yang terdapat pada Pasal tersebut beserta penjelasannya, telah dilakukan oleh KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur dengan hasil yang diperoleh adalah pinjaman bermasalah tersebut termasuk dalam kriteria pinjaman kurang lancar, untuk itu upaya penyelamatannya dilakukan dengan perpanjangan waktu pinjaman. Namun upaya ini tidak dapat berjalan karena debitur yang bersangkutan tetap tidak mampu untuk membayar angsuran, sehingga dilakukan mekanisme kewajiban kelompok, yang mana tidak semua kelompok di Koperasi penyelesaian pinjaman bermasalah menggunakan cara tersebut.¹² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum represif yang menggunakan jalur litigasi tidak dipergunakan, karena antara Koperasi dan anggota kelompok menyelesaikan pinjaman bermasalah tersebut dengan mekanisme kewajiban kelompok sehingga termasuk menggunakan jalur non litigasi.

Dengan peraturan perundang-undangan terkait perkoperasian yang tidak secara tegas dan jelas mengatur simpan pinjam yang menggunakan sistem tanggung renteng, maka berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*.¹³ Namun ketentuan khusus yaitu Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam ini hanya memperbolehkan penggunaan sistem tanggung renteng pada kegiatan simpan pinjam Koperasi, maka yang menjadi dasar dalam melakukan pinjaman tanggung renteng adalah ketentuan dalam KUHPdata, sehingga ketentuan umum tetap digunakan.

Penyelesaian pinjaman bermasalah yang menggunakan sistem tanggung renteng pada KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur dilakukan dengan

¹² Hasil wawancara dengan Pengurus KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur, Ibu Hesti Setyodyah Lestari, M.Psi, tanggal 11 Agustus 2014.

¹³ Muhammad Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia**, Penerbit Ikip Malang, Malang, 1995.

mengelompokkan pinjaman bermasalah tersebut ke dalam kriteria pinjaman kurang lancar, dan kemudian dilakukan proses penghitungan perpanjangan pinjaman, namun debitur tetap tidak mampu membayar. Pada akhirnya solusi terakhir adalah dengan mengajukan pinjaman debitur tersebut menjadi kewajiban kelompok, yang mana jumlah angsurannya disesuaikan dengan kemampuan membayar debitur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Namun pada prakteknya setelah menjadi kewajiban kelompok, debitur terkadang tidak memmbayar secara penuh, sehingga sisanya dibebankan kepada kelompok secara tanggung renteng. Mekanisme kewajiban kelompok ini menghendaki adanya pencairan simpanan pokok, wajib dan tabungan manasuk, yang mana dengan adanya pencairan tersebut, debitur secara otomatis keluar dari status keanggotaan Koperasi. Namun kelompok tidak memberitahukan status keluarnya debitur sebagai anggota dan melakukan upaya penagihan kepada debitur hal itu dilakukan agar mereka dapat memperoleh penggantian kembali biaya yang telah ditanggung renteng yang mana hal itu merupakan hak regres yang dimiliki oleh debitur tanggung renteng dan dilindungi oleh Pasal 1295 KUHPerdato.¹⁴

D. Penutup

a. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi anggota koperasi atas pinjaman yang menggunakan sistem tanggung renteng terdiri dari perlindungan hukum preventif yang terdiri dari Peraturan Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, dan juga Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295, dan perjanjian simpan pinjam.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ketua/Penanggungjawab Kelompok 139 Ibu Peni Setiya Martiningsih, S.E. pada tanggal 15 Juli 2014.

Perlindungan hukum represif terdiri dari Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, dan mekanisme di luar pengadilan (non litigasi). Yang setelah dianalisis ternyata peraturan perundang-undangan terkait dengan koperasi belum mengatur secara tegas dan jelas guna memberikan perlindungan hukum bagi anggota Koperasi terhadap simpan pinjam yang menggunakan sistem tanggung renteng dan penyelesaian pinjaman bermasalah yang menggunakan sistem tanggung renteng. Oleh karena itu, berlaku asas *Lex Specialist Derogat Lex Generalis*.

2. Penyelesaian pinjaman bermasalah yang menggunakan sistem tanggung renteng di KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur dilakukan dengan mengelompokkan pinjaman bermasalah tersebut ke dalam kriteria pinjaman kurang lancar, dan kemudian dilakukan proses penghitungan perpanjangan pinjaman, namun debitur tetap tidak mampu membayar. Pada akhirnya solusi terakhir adalah dengan mengajukan pinjaman debitur tersebut menjadi kewajiban kelompok, namun dalam setelah dijadikan kewajiban kelompok, debitur tidak dapat membayar secara penuh angsuran, sehingga sisanya harus di tanggung renteng sejumlah anggota kelompok 139.

b. Saran

1. Bagi Pemerintah

Sebaiknya pemerintah segera membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan tegas tentang simpan pinjam yang menggunakan sistem tanggung renteng, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng terlebih lagi jika pada simpan pinjam tersebut terjadi pinjaman bermasalah.

2. Bagi Koperasi

Dikarenakan peraturan perkoperasian terkait tanggung renteng tidak secara jelas dan tegas mengatur, maka KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur mengacu pada peraturan tanggung renteng yang ada dalam KUHPerduta. Sehingga saran yang dapat diberikan adalah agar Koperasi dapat segera mendorong Pemerintah yang terkait dengan Perkoperasian untuk segera membentuk peraturan mengenai sistem tanggung renteng. Dan juga dapat lebih selektif untuk memberikan pinjaman dengan membandingkan besarnya simpanan wajib dan pokok yang dimiliki anggota, yang sebelumnya proses tersebut telah dilakukan oleh kelompok.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat baik secara umum maupun bagi calon atau anggota Koperasi dapat lebih mengerti tentang sistem tanggung renteng, sehingga hak dan kewajiban masing-masing debitur dapat berjalan dengan baik dalam kegiatan simpan pinjam Koperasi yang menggunakan sistem tanggung renteng.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andjar Pachta W. dkk, ***Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi Pendirian, dan Modal Usaha***, Kencana, Jakarta. 2005.

Bambang Waluyo, ***Penelitian Hukum Dalam Praktek***, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Budi Untung, ***Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia***, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.

C.S.T. Kansil, ***Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*** Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Elza Syarief, **Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, KPG** (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta, 2012.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, **Penanggungan Utang Dan Perikatan Tanggung Menanggung**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, **Hukum Perusahaan & Kepailitan**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.

Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, **Kamus Pintar Bahasa Indonesia**, Fajar Mulya, Surabaya, 1996.

J. Satrio, **Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggungan (*Borgtocht*) dan Perikatan Tanggung-Menanggung**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

-----, **Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya**, PT. Alumni, Bandung, 1999.

Liga Alam M dan M. Taufik, **Refleksi Perjuangan Perempuan Dalam Meraih Martabat Dan Kemandirian** Membedah 30 Tahun Perjalanan Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Malang, Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur, Malang, 2007.

Mariam Darus Badruzaman *et.al.*, **Kompilasi Hukum Perikatan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Muhammad Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia**, Penerbit Ikip Malang, Malang, 1995.
Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi**, Peradaban, Surabaya, 2007.

Rahayu Hartini, **Hukum Komersial**, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2006.

Richard Burton Simatupang, **Aspek Hukum Dalam Bisnis**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Ridhuan Syahrani, **Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, PT. Alumni, Bandung, 2010.

R.T Sutantya Rahardja Hadikusuma, **Hukum Koperasi Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002.

Winanto Wiryomartani, **Aspek Hukum Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi**, Media Notariat, Jakarta, 2004.

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, **Hukum Perusahaan Dan Kepailitan**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.

UNDANG-UNDANG

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 116.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Umum.**

Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 96/Kep/M.KUKM/IX/2004, Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 158.1/PAD/BH/XVI/40/103/2008, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur.

Internet

Reza Rahmat, *Metode Penelitian Hukum Normatif (online)*, <http://reza.rahmat.blogspot.com/2013/01/metode-penelitian-hukum-normatif.html> (14 April 2014), 2013.

Umk Online, **Koperasi Wanita Berjaya Dengan Tanggung Renteng**, (online), [http://www.umkm-online.com/index.php/laporanutama/edisi2009/april/77 koperasi-wanita-berjaya-dengan-tanggung-renteng.html](http://www.umkm-online.com/index.php/laporanutama/edisi2009/april/77%20koperasi-wanita-berjaya-dengan-tanggung-renteng.html) (08 April 2014), 2009.